

MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA :

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Oleh:

Syarif Hidayat

NIM. 15230040

Pembimbing:

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag, M. Si

NIP. 19750701 200501 1 007

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-252/Un.02/DD/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA :
ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA WUKIRSARI KECAMATAN
IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYARIF HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 15230040
Telah diujikan pada : Rabu, 12 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdur Rozaki, S. Ag., M. Si
NIP. 19750701 200501 1 007

Penguji II

Dra. Siti Syamsiyatun, M.A., Ph.D.
NIP. 19640323 199503 2 002

Penguji III

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si.
NIP. 19810428 200312 1 003

Yogyakarta, 12 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Dekan



Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syarif Hidayat
NIM : 15230040
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul Skripsi : Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa :
Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wukirsari Kecamatan
Imogiri Kabupaten Bantul

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Februari 2020

Mengetahui,

Ketua Prodi PMI,

Pembimbing,

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, M. Si
NIP: 19810428 200312 1 003

Dr. Abdur Rozaki, S.Ag, M. Si
NIP: 19750701 200501 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syarif Hidayat

NIM : 15230040

Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul “Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa : Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Yogyakarta, 2 Februari 2020

Yang menyatakan,



Syarif Hidayat
NIM. 15230040

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan :

teruntuk kedua orang tua tercinta, yang telah mengajarkan tanggung jawab, tolong menolong, rasa hormat, dan kasih sayang.

MOTTO

“ Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah ”¹

(Buya Hamka)

¹ <https://www.kalamulama.com/kalam-ulama-109-buya-hamka-tentang>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020, pukul 20.00 WIB.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas *rahman* dan *rahim*-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat. Tak lupa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada baginda penghulu cinta Nabi Muhammad SAW, sang pencerah pembawa *syafa'at* bagi umatnya.

Atas selesainya skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih tanpa batas kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Nurjannah, M.Si, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos., M.Si, selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.
4. Bapak Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang ditengah-tengah kesibukannya dengan sabar memberikan saran dan masukan secara teliti kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Suyanto, S.Sos., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan tak henti-hentinya memberikan nasehat, semangat, dan motivasi kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu dosen Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan keterampilan serta menjadi ruang dialektika kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga.

7. Bapak Susilo Hapsoro, S.E, selaku Kepala Desa Wukirsari beserta pamong desa dan masyarakat Desa Wukirsari yang telah berkenan memberikan informasi guna penulisan skripsi ini kepada penulis.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Daliman Purwoatmojo dan Ibu Wasilah yang tak henti-hentinya mendo'akan penulis agar bisa menyelesaikan kuliah ini dengan kesadaran dan tanpa paksaan.
9. Kakak saya Eko Wibowo dan istri, atas limpahan doa dan dukungannya.
10. Djarum Beasiswa Plus yang telah memberikan kesempatan luar biasa kepada penulis untuk menjadi penerima beasiswa, sehingga dapat berjejaring dengan seluruh anak negeri.
11. Keluarga Beswan Djarum angkatan 33 seluruh Indonesia, pemimpin-pemimpin masa depan.
12. Keluarga besar di Keluarga Mahasiswa Bantul (KMB), yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berproses.
13. Keluarga Karang Taruna Mekar Bhakti dan Karang Taruna Budi Luhur Desa Wukirsari, tempat yang telah menumbuhkan jiwa sosial kepada penulis.
14. Keluarga besar HMPS PMI UIN Sunan Kalijaga, semoga selalu dimudahkan dalam menjalankan mandat organisasi yang menjadi wadah suara mahasiswa.
15. Keluarga Praktek Pengembangan Masyarakat, Danang, Khanif, Maiko, Febri yang merupakan rekan kerja sekaligus keluarga kecil di Dusun Kalidadap dan Serikat Petani Indonesia DIY.
16. Pengurus Laboratorium Pemberdayaan Masyarakat Prodi PMI, tempat penulis belajar keterampilan.

17. Keluarga besar prodi PMI angkatan 2015, selamat berpetualang di kehidupan masing-masing. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang berbeda membawa kesuksesan masing-masing pula.
18. Keluarga Kelompok KKN 96 “Bacak”, Ojan, Ilham, Bayu, Tyas, Nisa, Ratri, Ulya, Zahra, dan Lani. Semoga selalu diberikan kemudahan segala urusannya.
19. Kawan-kawan FORKOMMASI Wilayah III, semoga semangat untuk memberdayakan masyarakat selalu nyala di dalam hati, pikiran, dan tindakan.
20. Dan teruntuk semua keluarga yang belum bisa penulis sebutkan, semoga rahmat Allah SWT selalu melimpahkan kebaikan. Teruntuk partner hidup nanti, semoga selalu diberikan keberkahan dalam setiap penantian.

Penulis berharap karya sederhana ini dapat memberikan dampak baik bagi semua kalangan. Sebelumnya, penulis mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, kritik dan saran yang membangun masih penulis butuhkan. Pada akhirnya, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi siapapun yang ingin membaca.

Yogyakarta, 02 Februari 2020

Penulis

Syarif Hidayat

ABSTRAK

Momentum adanya pengalokasian dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memberikan nafas segar bagi desa. Tujuan pemberian dana desa ini diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai salah satu amanat dari dana desa, dibutuhkan kebijakan yang mendukung proses pembangunan masyarakat. Adanya dana desa memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan dari pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perencanaan pengelolaan kebijakan dana desa, strategi kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, dan dampak dari pengelolaan dana desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi di lapangan. Informan pada penelitian ini adalah pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis pengelolaan dana desa ini di fokuskan selama tiga tahun anggaran, yaitu tahun 2017 sampai dengan 2019.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Wukirsari telah sesuai dengan regulasi yaitu Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, mulai dari proses perencanaan kebijakan, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, pemerintah desa membuat strategi kebijakan melalui program-program yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Strategi kebijakan ini berpedoman pada regulasi dalam Permendes PDTT yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa setiap tahunnya. Sedangkan dampak kesejahteraan dari pengelolaan dana desa ini telah dirasakan oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, dukungan produk unggulan desa, serta penguatan ekonomi masyarakat miskin.

Kata Kunci : Dana Desa, Kebijakan, Kesejahteraan Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	4
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Kerangka Teori	15
H. Metode Penelitian	23
I. Sistematika Pembahasan	27

BAB II: GAMBARAN UMUM DESA WUKIRSARI

A. Profil Desa Wukirsari.....	29
B. Sejarah Desa Wukirsari.....	38
C. Dana Desa dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Wukirsari.....	42

BAB III: MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA

A. Proses Perencanaan Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014.....	47
B. Strategi Kebijakan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa	65
C. Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	75

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Batas Desa Wukirsari.....	30
Tabel 2	Jumlah Penduduk.....	30
Tabel 3	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 4	Sarana dan Prasarana	32
Tabel 5	Nama Pejabat Pemerintah Desa Wukirsari	35
Tabel 6	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wukirsari.....	36
Tabel 7	Pendapatan Desa Tahun 2017 - 2019.....	42
Tabel 8	Dana Desa TA 2017	66
Tabel 9	Dana Desa TA 2018.....	68
Tabel 10	Dana Desa TA 2019	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Desa Wukirsari	29
Gambar 2	Musyawarah Dusun RPJMDes Tahun 2018-2024	58
Gambar 3	Sistem Informasi Desa Desa Wukirsari	62
Gambar 4	Jalan Dusun Sebelum Ada Dana Desa	77
Gambar 5	Jalan Dusun Setelah Ada Dana Desa.....	77
Gambar 6	Bangkit Sungai Penanggulangan Banjir	79
Gambar 7	PAB Desa Wukirsari	81
Gambar 8	Gedung PAUD Dusun Nogosari I	81
Gambar 9	Kamar Mandi Warga Yang Dibangun Dari Dana Desa	83
Gambar 10	Kelompok Kesenian Desa	85
Gambar 11	Pembinaan Kelompok Pengrajin Sepatu Rajut	87

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kewenangan Desa	8
Bagan 2	Struktur Pemerintah Desa Wukirsari	34
Bagan 3	Landasan Hukum Perencanaan Pembangunan Desa	48
Bagan 4	Siklus Perencanaan Desa	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kekeliruan dalam memahami maksud dari penelitian yang berjudul *Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul*, maka dipandang perlu adanya penegasan beberapa istilah dari judul penelitian tersebut.

1. Membangun Kesejahteraan Masyarakat

Istilah membangun disini diartikan bangkit, berdiri, memperbaiki.¹ Pengertian tentang kesejahteraan mempunyai arti yang sangat luas, mencakup berbagai macam tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.² Kesejahteraan dalam perspektif masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang subjektif maupun objektif. Dalam sudut pandang subjektif maksudnya adalah penggambaran tentang kondisi sejahtera berdasarkan konstruksi masyarakat atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut sudut pandang objektif adalah gambaran kesejahteraan menurut suatu kajian ilmu pengetahuan yang dapat digunakan secara umum, atau dalam arti lain merupakan rumusan kesejahteraan berdasarkan pandangan politik dan ideologi tertentu. Dalam sudut pandang subjektif, gambaran tentang kondisi sejahtera tidak

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membangun>, diakses pada tanggal 3 November 2019, pukul 14.15 WIB.

² Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Intervensi Komunitas* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), hlm.4.

dapat digeneralisasi sehingga masyarakat mempunyai konstruksi yang berbeda tentang kondisi kesejahteraan.³

Masyarakat terbentuk dari proses relasi sosial yang berkelanjutan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Interaksi yang terjadi secara berkesinambungan dalam waktu yang lama menghasilkan perasaan kebersamaan. Selain itu, interaksi sosial juga menghasilkan pola hubungan bersama, nilai yang diakui bersama, serta institusi sosial. Nilai dan institusi sosial tersebut dapat menjadi instrumen untuk menciptakan kehidupan yang lebih teratur dan lebih baik. Dengan demikian, kesejahteraan menjadi idaman bagi setiap orang dan setiap masyarakat.⁴

Menurut Miftachul Huda, orang atau masyarakat yang sejahtera adalah ketika semua kebutuhannya tercukupi, mampu melaksanakan perintah agama, dan bisa membaur dengan masyarakat. Ketika ketiga aspek tersebut telah terpenuhi pasti orang atau masyarakat tersebut akan bahagia. Akan tetapi terdapat juga orang atau masyarakat yang kebutuhannya terutama kebutuhan pokoknya belum mampu terpenuhi dianggap bisa hidup bahagia. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat lebih diartikan dengan tercapainya kebutuhan material, spiritual, dan

³ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Prespektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.27.

⁴ *Ibid*, hlm.1.

sosial guna Bergeraknya taraf hidup seseorang atau kelompok dengan grafik yang semakin naik kondisinya.⁵

Dari pengertian di atas, yang penulis maksud dengan membangun kesejahteraan masyarakat dalam skripsi ini adalah terpenuhinya kebutuhan hidup kelompok masyarakat di suatu tempat meliputi material, spiritual, dan sosial sehingga dapat melaksanakan fungsi kemasyarakatannya secara mandiri.

2. Dana Desa

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa, disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

3. Desa Wukirsari

Desa Wukirsari adalah nama desa dimana penelitian ini dilakukan. Secara administratif, Desa Wukirsari termasuk di dalam wilayah Kecamatan Imogiri. Letak geografis desa ini terdapat disebelah timur Kabupaten Bantul dengan jarak sekitar 10 km dari ibu kota kabupaten.

⁵ Miftachul Huda, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), hal.71.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 1ayat (8).

Adapun tepatnya desa ini berada di sebelah utara ibu kota Kecamatan Imogiri dengan jarak sekitar 3 km.⁷

Jadi yang dimaksud dengan judul *“Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul”* adalah suatu kajian penelitian tentang proses perencanaan kebijakan pengelolaan dana desa, strategi kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa, serta dampak dari pengelolaan dana desa tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.

B. Latar Belakang

Pembangunan desa pada hakikatnya merupakan basis dari pembangunan nasional. Ketika desa telah mampu melakukan pembangunan secara mandiri maka kemakmuran masyarakat akan mudah terwujud dan secara nasional akan meningkatkan indeks kemakmuran masyarakat Indonesia.⁸ Pembangunan nasional adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun tujuan dari pembangunan adalah untuk membangun kemandirian, termasuk pembangunan pedesaan. Sebagian besar penduduk Indonesia sendiri hidup di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan.⁹

⁷ Monografi Desa Wukirsari Tahun 2018.

⁸ Dita Angga Rusiana, *BUMDes Motor Penggerak Desa*, ditulis pada tanggal 26 Januari 2017, terdapat di <http://ekbis.sindonews.com/read1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-desa-1485440604>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB.

⁹ H.A.W. Widjaya, *Otonomi Desa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.3.

Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan daerah pedesaan yang meliputi infrastruktur dan penguatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan mendukung ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi pemerintahan desa, serta mengoptimalkan sumber daya desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi pada kenyataannya, pembangunan pedesaan dirasa masih kurang sehingga banyak desa yang masih saja tertinggal. Padahal telah banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan masalah ketertinggalan desa tersebut, seperti meningkatkan anggaran untuk pembangunan desa setiap tahun agar mampu mengurangi jumlah desa yang tertinggal dan beberapa program lainnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan desa antara lain bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, serta memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.¹⁰ Dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, kemudian lahir kebijakan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹¹

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, negara menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan

¹⁰ <http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-desa-melalui-bumdes.html>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

¹¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), hlm.1.

demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya juga diharapkan akan terwujudnya desa yang mandiri, sehingga desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat. Ada sedikitnya dua hal yang menjadi alasan desa dapat mandiri, yaitu sebagai komponen, desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat. Selain itu, desa mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dan mencukupi kebutuhan serta kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar, dan lain-lain. Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.¹²

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai tugas dan fungsinya, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.¹³ Dana desa telah memberi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial dasar, pengembangan kegiatan ekonomi, dan peningkatan keberadaan masyarakat.

¹² Chabib Sholeh, Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung : Fokus Media, 2015), hlm.54.

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017), hlm.11.

Dana desa mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan perencanaan program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, dan prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa ada empat kewenangan desa meliputi:¹⁴

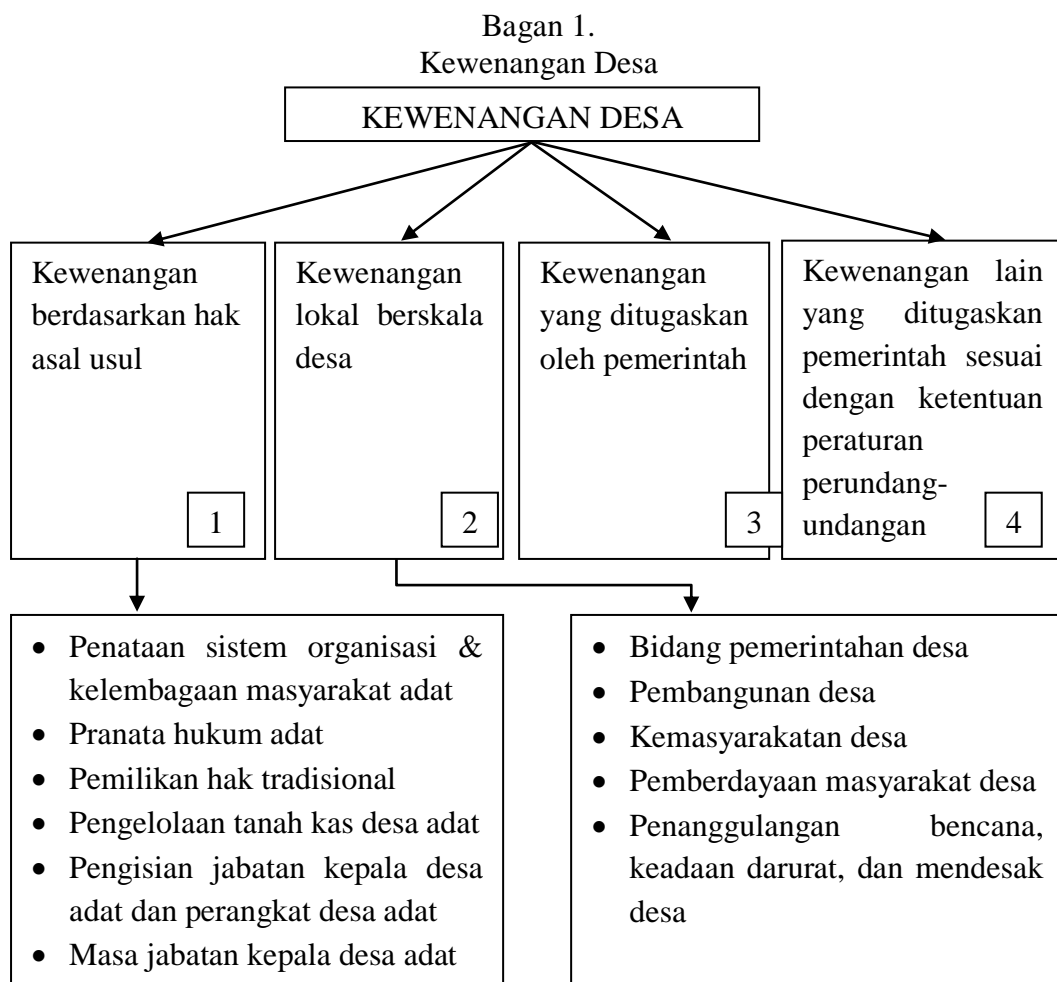
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kewenangan ini disebut juga sebagai hak purba, hak tradisional, hak bawaan, atau hak asli yang mempunyai dua pengertian, yaitu hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa sampai sekarang, serta hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan ini terkait dengan kepentingan masyarakat setempat yang sudah dijalankan oleh desa, karena muncul dari prakarsa masyarakat.
3. Kewenangan yang ditugaskan pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota atau kabupaten. Penugasan seperti halnya tugas pembantuan, tidak bermakna pengaturan tentang penyerahan atau pelimpahan secara

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, pasal 33.

permanen yang dirumuskan dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan daerah.

4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah berbagai undang-undang sektoral yang berkaitan dengan desa.

Empat kewenangan yang dimandatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 menjadi wajib diketahui oleh pemerintah desa. Secara sederhana, empat kewenangan desa tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini :



Dengan adanya dana desa ini mempunyai peluang untuk terjadinya tindakan penyimpangan pengelolaan dana desa, baik secara prosedural maupun oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari adanya program dana desa ini. Tindakan penyimpangan dana desa ini sudah terjadi di beberapa desa di Indonesia sehingga perlu menjadi perhatian khusus agar tujuan adanya dana desa ini dapat tercapai yaitu untuk mengatasi kesenjangan, meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, dan memberikan kesejahteraan masyarakat desa.¹⁵ Masyarakat sebagai subyek pembangunan desa harus terlibat dalam pengelolaan dana desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyebutkan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah, selain adanya unsur transparansi, akuntabel, tertib, dan disiplin anggaran.

Selama ini partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa dirasa masih kurang maksimal. Hal itu terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya merasa memiliki terhadap program dana desa sehingga bersikap acuh dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang terjadi di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, masyarakat dinilai masih kurang aktif dalam pengelolaan dana desa ini. Prakteknya di lapangan sebagian masyarakat hanya mengikuti segala sesuatu yang telah direncanakan oleh kepala dusun ataupun pemerintah desa. Artinya, kesadaran untuk ikut andil sebagai subyek pembangunan masih perlu untuk ditingkatkan lagi supaya proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan benar-benar dapat dimainkan oleh masyarakat.

¹⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

Desa Wukirsari yang terletak di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul mempunyai potensi yang beragam, meliputi potensi wisata alam, kuliner, kerajinan, budaya, dan pertanian. Namun, hal ini belum sepenuhnya dimaksimalkan dengan baik dan benar oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Dengan berbagai macam potensi yang dimiliki ini, nyatanya belum mampu mengangkat perekonomian masyarakat secara optimal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pendamping desa di wilayah Kecamatan Imogiri, bahwa data pada tahun 2018 menunjukkan dari delapan desa di Kecamatan Imogiri, Desa Wukirsari menempati posisi kedua sebagai desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Melihat kondisi yang demikian ini, pemerintah desa mempunyai peran besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan adanya kucuran dana desa. Peranan ini dapat diwujudkan dalam melaksanakan proses perencanaan kebijakan pengelolaan dana desa dan membuat strategi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan berdampak pada hasil akhir yang diperoleh dan dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dikaji karena dalam pelaksanaannya tentu setiap desa mempunyai ciri khas masing-masing sehingga dapat dijadikan sebagai model dalam kebijakan pengelolaan dana desa. Peneliti melakukan penelitian di Desa Wukirsari dengan judul ***“Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.”***

C. Rumusan Masalah

Dana desa menjadi angin segar bagi desa-desa di Indonesia yang selama ini mengalami keterbatasan anggaran untuk melakukan pembangunan. Adanya dana desa ini menjadi harapan baru untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Akan tetapi dengan adanya dana desa ini juga menjadi tantangan baru bagi pemerintah desa untuk mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga cita-cita mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dari pemaparan yang telah penulis jelaskan di atas, maka titik fokus pada rumusan masalah ini adalah :

1. Bagaimanakah proses perencanaan kebijakan pengelolaan dana desa tersebut ?
2. Bagaimana strategi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui dana desa tersebut ?
3. Seperti apakah dampak dari kebijakan pengelolaan dana desa tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk menjawab titik fokus pada rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, yaitu: *Pertama*, mendeskripsikan proses perencanaan pengelolaan kebijakan dana desa. *Kedua*, menjelaskan strategi kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui dana desa. *Ketiga*, mendeskripsikan dampak dari pengelolaan dana desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Desa Wukirsari.

E. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat secara teoritis maupun secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan Pengembangan Masyarakat Islam. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi bahan komparasi bagi penelitian lain yang mengkaji tentang Dana Desa. Perubahan dan perkembangan kebijakan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan dana desa. Sedangkan manfaat secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wawasan bagi peneliti, relawan sosial, pembaca, dan masyarakat pada umumnya tentang program dana desa. Penelitian ini juga diharapkan membawa dampak baik bagi keberlangsungan masyarakat Desa Wukirsari serta mampu mendorong Pemerintah Desa Wukirsari untuk merumuskan kebijakan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

F. Tinjauan Pustaka

Kajian penelitian tentang Dana Desa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penyajian dan sudut pandang yang beragam. Sebelum melakukan penelitian, penulis akan melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa atau terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Penelitian Muhammad Nafiudin, mahasiswa program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Dana Desa dan Pengentasan*

Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang".¹⁶ Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik yang digunakan cara interview, observasi, dokumentasi. Fokus penelitian tersebut adalah implementasi dana desa dan dampak dari pelaksanaan dana desa untuk mengentaskan kemiskinan. Tentunya skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini dalam hal objek serta subjek yang diteliti.

Artikel yang berjudul "Analisis Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah", ditulis oleh Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, dan Rd. Ahmad Buchari.¹⁷ Dalam artikel ini membahas permasalahan dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa yang ternyata belum memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah. Salah satu penyebabnya adalah desa diberikan kewenangan seluas-luasnya sesuai UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, sehingga dalam menentukan rencana program pemerintah daerah sulit untuk mengintegrasikan kebijakan program pembangunan. Artikel tersebut memiliki kesamaan fokus, yaitu dampak pengelolaan dana desa. Namun tentu saja berbeda dalam obyek maupun subyek penelitiannya.

¹⁶ Muhammad Nafiudin, *Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang*, Skripsi (Yogyakarta: UIN sunan kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm.36-38.

¹⁷ Yanhar Jamaluddin,dkk, "Analisis Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, vol. 6:1 (2018), hlm.17-18.

Jurnal yang berjudul “*Pengelolaan Keuangan Dana Desa*”, ditulis oleh Inten Meutia dan Liliana.¹⁸ Penelitian tersebut membahas tentang analisis implementasi akuntabilitas pengelolaan dana desa serta keterkaitan tentang kemandirian pangan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Skripsi dari Endang Juliana dengan judul “*Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*”.¹⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana desa berperan memberikan pendapatan riil di masyarakat pedesaan. Selain itu juga mempunyai peran dalam menambah sarana dan prasarana fisik di pedesaan.

Skripsi dari Miftahuddin dengan judul “*Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*”.²⁰ Penelitian ini mengkaji tentang akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam hal pelaporan penggunaan dana desa dilakukan melalui media informasi digital dan papan informasi yang disebar di tiap-tiap dusun sebagai bentuk transparansi.

Berdasarkan kajian pustaka di atas, yang dapat membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan objek, subjek, waktu, dan tempat penelitian serta masalah yang disajikan dalam rumusan masalah. Sehingga dapat dipahami bahwa penelitian dengan judul “*Membangun*

¹⁸ Inten Meutia dan Liliana, “Pengelolaan Keuangan Dana Desa”, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 8 : 2 (Agustus, 2017), hlm.338.

¹⁹ Endang Juliana, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm.75.

²⁰ Miftahuddin, *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul” memiliki perbedaan yang jelas dan belum pernah dilakukan penelitian yang sama sebelumnya.

G. Kerangka Teori

Judul penelitian ini adalah “*Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa : Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul*”, supaya penelitian ini tidak keluar dari fokus maka penulis membutuhkan teori ilmiah sebagai kerangka berfikir dalam penulisan hasil penelitian. Teori tentang kesejahteraan dan perencanaan strategis sangat penting dijadikan landasan teori dalam penelitian ini.

1. Teori kesejahteraan

Berangkat dari asumsi bahwa konstruksi masyarakat tentang kondisi sejahtera yang diidealkan sangat dipengaruhi oleh akar budayanya, maka bagi Indonesia sebagai negara dengan masyarakat majemuk, potensi terjadinya perbedaan dalam konstruksi masyarakat sejahtera tersebut cukup besar. Perbedaan tersebut dapat terjadi baik antara masyarakat lokal yang satu dengan yang lain, maupun antara masyarakat dengan negara. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kondisi kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat apabila semakin banyak kebutuhan dapat terpenuhi. Dengan demikian, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak terkait dengan identifikasi kebutuhan dan upaya untuk pemenuhannya. Dalam rangka kebijakan yang bersifat nasional, kebutuhan masyarakat dirumuskan melalui standar normatif. Di lain pihak, masyarakat

dengan latar belakang sosiokultural yang berbeda dapat mempunyai konstruksi yang berbeda tentang kebutuhan dan kesejahteraan.²¹

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan tersebut, kondisi masyarakat sejahtera dapat dilihat dari pandangan objektif dan subjektif. Pandangan subjektif maksudnya adalah visi kesejahteraan berdasarkan perspektif masyarakat atau komunitas tertentu, atau gambaran masyarakat ideal dalam konstruksi masyarakat khususnya masyarakat lokal. Meskipun kondisi kehidupan yang sejahtera adalah kondisi ideal yang diharapkan oleh setiap masyarakat, akan tetapi masyarakat mempunyai konstruksi yang berbeda. Oleh karena itu, visi masyarakat yang satu dapat berbeda dengan yang lain tergantung konstruksinya tentang kesejahteraan yang di latar belakang oleh kondisi sosiokultural, permasalahan yang dihadapi, dan faktor kesejarahannya. Ukuran subjektif ini lebih melihat kesejahteraan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat.²²

Sementara itu, pandangan objektif merupakan gambaran kesejahteraan menurut kajian ilmu pengetahuan atau berdasarkan pandangan politik atau ideologi tertentu. Ukuran objektif menggunakan parameter yang objektif pula, sehingga cenderung bersifat normatif. Dengan demikian, ukuran dari pandangan objektif ini pemenuhan kebutuhan yang dilihat adalah kebutuhan normatif.²³

2. Teori perencanaan strategis

Perencanaan. Pengertian perencanaan menurut Badrudin adalah proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk

²¹ Soetomo, *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Prespektif Masyarakat Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.5.

²² *Ibid*, hlm.9.

²³ *Ibid*, hlm.10.

mencapai tujuan tertentu.²⁴ Sedangkan Sudjana mengemukakan bahwa perencanaan merupakan proses yang menggabungkan pengetahuan dan teknik ilmiah di dalam kegiatan organisasi.²⁵ Berdasarkan pendapat tersebut, pengertian perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan keperluan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan strategis. Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi mengerjakan hal seperti itu. Selain itu, perencanaan strategis juga mensyaratkan pengumuman informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan.²⁶ Terdapat delapan langkah dalam perencanaan strategis menurut John M. Bryson yang harus mengarah pada tindakan, hasil, dan evaluasi.²⁷

Pertama, memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (*decision makers*) atau pembentuk opini (*opinion leaders*) internal dan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan

²⁴ Badrudin, *Dasar-dasar Manajemen : Pengertian Evaluasi, Fungsi dan Tujuan Evaluasi, dan Model Evaluasi*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm.54.

²⁵ Sudjana H.D, *Manajemen Pendidikan Luar Sekolah : Fungsi dan Karakteristik Perencanaan* (Bandung : Nusantara Press, 1992), hlm.41.

²⁶ John M. Bryson, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Terj. M. Miftahudin (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000), hlm.5.

²⁷ *Ibid*, hlm.55.

strategis dan langkah perencanaan yang terpenting. Langkah ini merupakan tahapan menegosiasikan kesepakatan untuk menyelenggarakan perencanaan strategis dengan orang-orang penting pembuat keputusan atau pembentuk opini dan stakeholder baik internal maupun eksternal. Dukungan dan juga komitmen mereka merupakan hal yang sangat penting demi keberhasilan perencanaan strategis ini. Keterlibatan orang-orang penting diluar organisasi terkadang sangat krusial apabila dalam implementasinya melibatkan banyak pihak di luar organisasi.

Pada tahapan ini dibentuk kelompok pemrakarsa, yang salah satu tugasnya adalah menetapkan orang-orang yang akan terlibat dalam membuat keputusan. Tugas lainnya yaitu menetapkan orang, kelompok, atau unit mana yang harus dilibatkan dalam penyusunan perencanaan strategis ini. Dalam kesepakatan ini harus mencakup maksud upaya perencanaan, langkah-langkah yang dilalui dalam proses, bentuk dan jadwal pembuatan laporan, peran fungsi dan keanggotaan kelompok atau komite yang mengawasi upaya tersebut, peran fungsi dan keanggotaan tim perencana strategis, dan komitmen sumber daya yang diperlukan bagi keberhasilan perencanaan strategis. Langkah ini akan menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu tujuan dan manfaat usaha manajemen strategis, keterlibatan organisasi, unit grup, dan individu, langkah spesifik yang akan dilaksanakan, format dan waktu laporan.

Kedua, memperjelas mandat organisasi. Mengidentifikasi mandat organisasi untuk memperjelas mandat yang diberikan otoritas dari eksternal baik formal dan informal. Secara formal dan informal, mandat organisasi memuat hal-hal yang

harus dilaksanakan meliputi persyaratan-persyaratan, batasan-batasan, harapan, dan tekanan yang dihadapi. Mandat formal dan informal yang terdapat pada sebuah organisasi adalah sebuah keharusan yang dihadapi. Mandat formal merupakan tugas dan fungsi dari organisasi yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan, piagam, pasal-pasal, ataupun perjanjian yang mengikat dalam surat keputusan. Sedangkan mandat informal merupakan norma-norma yang menjadi pegangan beroperasinya organisasi yang tidak kalah mengikatnya. Melalui langkah ini akan diperoleh identifikasi atas mandat organisasi baik formal maupun informal, penafsiran mengenai kewajiban dari organisasi berdasarkan mandat tersebut, dan klarifikasi tentang bidang aktivitas apa yang tidak dibatasi.

Ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi organisasi berkaitan erat dengan mandat yang harus dikerjakan. Nilai-nilai yang dimaksudkan disini merupakan norma-norma yang tumbuh dan berkembang serta dipelihara yang menjadi spirit organisasi dalam melaksanakan fungsinya, misal demokratis, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab. *Keempat*, menilai lingkungan internal. Perencanaan strategis harus mengeksplorasi lingkungan organisasi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi. Kita dapat mengenalinya melalui sumber daya (*input*), strategi yang dijalankan sekarang (*process*), dan kinerja (*output*).

Kelima, menilai lingkungan eksternal. Merupakan tindakan mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor yang di luar kontrol organisasi,

meliputi kecenderungan politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi, kelompok masyarakat yang harus dilayani, dan pesaing.

Keenam, mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Mengidentifikasi isu strategis merupakan bagian terpenting dalam proses perencanaan strategis yang mempunyai tujuan untuk mempelajari lebih mendalam pilihan kebijakan pokok yang akan dilaksanakan organisasi. Isu-isu strategis merupakan pernyataan mendasar yang mempengaruhi kebijakan. Pernyataan ini mengandung tiga elemen, yaitu isu strategis harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, berbagai faktor yang membuat isu menjadi tantangan fundamental harus didaftar, dan konsekuensi kegagalan dalam menghadapi isu harus merupakan taruhan hidup dan matinya organisasi.

Ketujuh, merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dilakukan, dan mengapa organisasi harus melakukannya. Strategi dapat berbeda-beda karena tingkat, fungsi, dan kerangka waktu. Perumusan strategi dapat dikerjakan melalui analisis SWOT, dengan melihat faktor internal organisasi (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal organisasi (peluang dan ancaman). Perumusan strategi dimulai dengan mengidentifikasi alternatif praktis dan visi atau impian untuk memecahkan isu strategis. Selanjutnya, merinci hambatan yang kemungkinan dihadapi untuk mencapai alternatif dan visi tersebut. Setelah mengidentifikasi alternatif dan visi bersama-sama dengan hambatan tersusun, kemudian mengembangkan usulan pokok untuk mencapai alternatif dan visi

secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengatasi hambatan. Setelah usulan utama diajukan, langkah berikutnya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang diperlukan dalam dua sampai lima tahun mendatang. Paling akhir kemudian menyusun program kerja yang terperinci untuk setiap tahunnya.

Kedelapan, menciptakan visi organisasi yang efektif untuk masa depan. Langkah terakhir dari proses perencanaan adalah bagaimana seharusnya organisasi itu berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya. Deskripsi ini yang disebut dengan visi keberhasilan organisasi. Secara khusus yang termasuk dalam deskripsi ini adalah misi organisasi, strategi dasarnya, kriteria kinerjanya, beberapa aturan keputusan penting, dan standar etika yang diharapkan oleh seluruh pegawai. Visi keberhasilan harus singkat, tidak boleh lebih dari beberapa halaman dan juga memberi ilham. jadi, visi itu fokus kepada masa depan yang lebih baik, mendorong harapan dan impian, menarik nilai-nilai umum, menyatakan hasil yang positif, menekankan kekuatan kelompok yang bersatu, serta mengemukakan entusiasme dan kegembiraan.

Dalam proses perencanaan strategis juga terdapat tantangan yang terdiri dari empat indikator masalah sebagai berikut :

1. Masalah manusia

Masalah manusia adalah manajemen perhatian dan komitmen. Perhatian orang-orang kunci harus difokuskan pada isu, konflik, dan preferensi kebijakan di tempat kunci dalam proses dan hierarki organisasi. Manajemen perhatian dan komitmen merupakan masalah bagi individu, kelompok, organisasi, dan komitmen.

2. Masalah proses

Masalah proses adalah manajemen ide strategis menjadi *good currency*. Kearifan yang tidak konvensional harus diubah menjadi kearifan yang konvensional. Masalah proses yang terpenting dalam perencanaan strategis adalah manajemen ide strategis menjadi *good currency*, dengan kata lain bagaimana menjual ide baru kepada cukup banyak orang.

3. Masalah struktural

Masalah struktural dalam perencanaan strategis adalah mengkaitkan lingkungan internal dan eksternal yang melintasi tingkat-tingkat secara bermanfaat. Tantangan bagi para perencana strategis adalah meyakinkan bahwa keseluruhan terletak dalam bagian-bagiannya, mereka harus menggunakan pendekatan holografik bukan pendekatan komposisional.

4. Masalah kelembagaan

Masalah yang sulit dalam perencanaan strategis mencakup transformasi lembaga. Perkembangan karakter lembaga sebagian besar merupakan tanggung jawab pemimpin. Tugas utama kepemimpinan lembaga adalah mendefinisikan misi lembaga, pengejawentahan struktur dan sistemnya, dan pengaturan konflik internal.²⁸

Berangkat dari teori tersebut, penulis akan menilai data yang diperoleh dari hasil proses perencanaan kebijakan dan strategi kebijakan yang dilakukan

²⁸ *Ibid*, hlm.227-228.

oleh Pemerintah Desa Wukirsari untuk membangun kesejahteraan terhadap masyarakatnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini berjudul “*Membangun Kesejahteraan Masyarakat Melalui Dana Desa: Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul*”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang didefinisikan Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J. Moleong sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁹ Dengan metode ini penulis berharap mendapatkan data-data yang akurat dan lengkap berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta untuk mengenal lebih mendalam para informan (pemerintahan desa dan masyarakat Desa Wukirsari) berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan kebijakan dana desa, strategi kebijakan, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat melalui dana desa tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Alasan memilih lokasi ini karena ingin mengetahui seberapa jauh proses perencanaan dari pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wukirsari. Peneliti juga ingin mengetahui hasil yang dirasakan oleh masyarakat sejak adanya dana desa di Desa Wukirsari. Dana desa mempunyai implikasi yang sangat besar dan juga signifikan terhadap pembangunan sebuah desa yang ada di

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2007), hlm.6.

Indonesia. Selanjutnya karena belum ada penelitian yang sejenis di lokasi penelitian sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa.

Subyek penelitian merupakan sumber data atau sumber tempat memperoleh keterangan penelitian.³⁰ Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Wukirsari dan masyarakat Desa Wukirsari. Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah proses perencanaan dan pengelolaan kebijakan dana desa di Desa Wukirsari, strategi kebijakan, juga dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Wukirsari.

Untuk teknik pengambilan informan pada penelitian ini penulis menggunakan teknik kriteria atau pengambilan informan berdasarkan tujuan atau pertimbangan tertentu untuk memperoleh informasi yang diperlukan penulis. Tujuan dari penentuan informan ini adalah untuk mempermudah dalam pencarian sampel informan. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai subyek penelitian adalah pelaksana kegiatan dan pihak-pihak yang terkait. Dari Pemerintah Desa Wukirsari meliputi Kepala Desa yaitu Bapak Susilo Hapsoro, S.E, Sekretaris Desa yaitu Ibu Maryanti, Kepala Seksi Pelayanan yaitu Bapak Muiz Yoga Maulana, S.Si, Kepala Seksi Kesejahteraan yaitu Bapak Asnan Hidayat, dan Ketua Paguyuban Dukung Desa Wukirsari yaitu Bapak Marsudi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meliputi ketua yaitu Bapak Sutrisno, M.Pd. Dari perwakilan masyarakat Desa Wukirsari yaitu Bapak Rahmat Hidayat sebagai Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Ibu Istijannah sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM)

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm.119.

sekaligus perwakilan perempuan, Ibu Winanti selaku perajin sepatu rajut, Suparman sebagai Ketua RT, Supiono sebagai Ketua Kelompok Tani, dan Wahyu Nur Setiawan sebagai Karang Taruna desa.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data, yaitu observasi. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.³¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, kendala yang dihadapi, serta dampak pada masyarakat di Desa Wukirsari mulai dari proses musyawarah, penyusunan dokumen, dan implementasinya. Selanjutnya menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.³² Dalam hal ini penulis telah mewawancarai beberapa informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi pelayanan, kepala seksi kesejahteraan, ketua paguyuban dukuh, ketua BPD, dan perwakilan dari masyarakat.

Metode yang terakhir adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, yakni mengumpulkan data dari pihak terkait baik berupa catatan, arsip,

³¹ HadariNawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gama Univ. Press, 1995), hlm.100.

³² *Ibid.* hlm.111.

gambar, dan dokumen lainnya.³³ Dokumen dalam penelitian ini yang berkaitan dengan program-program yang dibiayai dana desa, seperti RPJM Desa tahun 2018-2024, RKP Desa, APB Desa tahun anggaran 2017 - 2019, laporan realisasi APB Desa, dan dokumen terkait lainnya.

Dalam sebuah penelitian, pengujian kebenaran data merupakan tahapan yang sangat penting. Untuk mengetahui kevalidan data yang didapat selama penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber, yaitu melakukan pengecekan kredibilitas antara beberapa sumber.³⁴ Data yang didapatkan kemudian dilihat kebenarannya dengan mencocokkan hasil wawancara satu dengan yang lainnya, serta dengan observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber adalah pemerintahan desa dan masyarakat Desa Wukirsari. Dengan triangulasi sumber ini bisa diketahui apakah informan memberikan data yang sama atau tidak, data yang didapat berbeda maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut belum kredibel.

Sesudah proses pengumpulan data selesai maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Menurut Patton dalam Basrowi, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasinya kedalam suatu pola kategori dari satuan uraian dasar.³⁵ Proses analisis data terdapat tiga langkah menurut Milles dan Hubberman dalam Sugiyono yaitu :³⁶ *Pertama*, adalah reduksi data. Reduksi data merupakan proses penilaian, pemutusan perhatian pada penyederhanaan,

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.329.

³⁴ Andi, *Metode Penelitian*, hlm.269.

³⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm.188.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.92-95.

pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini proses reduksi data dimulai dari memilah-milah data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara. Setelah data dipilah peneliti melakukan pengkodean data, yaitu mengkodekan data menggunakan simbol berdasarkan informan dan waktu wawancara untuk mempermudah mencari data. Selanjutnya data yang sudah diberi kode, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

Kedua, adalah penyajian data. Setelah data dipilah dan disesuaikan dengan fokus penelitian, maka selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk narasi atau uraian yang lebih mudah dipahami dan komunikatif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan. Setelah data tersebut disajikan kemudian peneliti melakukan penarikan kesimpulan awal berdasarkan hasil temuan data. Untuk mengarah pada kesimpulan akhir ini tentunya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari catatan wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain-lain yang didapatkan pada saat melakukan kegiatan di lapangan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan skripsi, serta memberikan gambaran tentang pembahasan secara menyeluruh. Maka penulisan ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab memiliki sub-sub bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menguraikan tentang gambaran umum Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, meliputi sejarah terbentuknya Desa Wukirsari dan sejarah kepemimpinan desa, kondisi geografis, kondisi demografis, stuktur organisasi pemerintahan, serta gambaran sosial budaya di masyarakat secara umum.

Bab Ketiga, berisi tentang hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan temuan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan diuraikan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.

Bab Keempat, merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang didasarkan pada hasil penelitian, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan Pemerintah Desa Wukirsari secara khusus dan masyarakat Desa Wukirsari secara umum.

Pada akhir skripsi juga disajikan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang penulis temukan, maka dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan kebijakan dan mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul ini sudah sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis pengelolaan dana desa. Langkah-langkah perencanaan kebijakan di Desa Wukirsari jika dinilai menggunakan teori perencanaan strategis dari John M. Bryson, secara keseluruhan sudah memenuhi meskipun terdapat satu langkah yang masih belum nampak yaitu mengeksplorasi lingkungan pemerintah desa untuk menggali kekuatan dan kelemahan yang ada di lingkungan internal.

Meskipun demikian, penentuan kegiatan masih didominasi aktor-aktor yang memangku kebijakan. Masyarakat belum terlalu aktif untuk mengikuti dan mengawal pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Pemerintah desa telah membuka ruang-ruang untuk menampung usulan dan aspirasi dari masyarakat desa. Mekanisme untuk menampung usulan dan masukan dari masyarakat ini melalui web desa, media sosial milik desa, jaring aspirasi masyarakat oleh BPD yang dilaksanakan satu tahun sekali, maupun disampaikan langsung melalui layanan pengaduan ke ruang BPD yang berada di kantor desa setiap harinya. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tipologi kepemimpinan di Desa Wukirsari ini bersifat

demokratis tetapi masyarakatnya belum partisipatif jika dilihat dari proses perencanaan kebijakannya.

Strategi kebijakan dari pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui dana desa ini telah dilaksanakan dengan penentuan program-program yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahunnya. Penentuan kebijakan penggunaan dana desa ini didasarkan pada regulasi prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rumusan strategi kebijakan dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat adalah berbentuk pembangunan infrastruktur, pelatihan peningkatan keahlian, membuka relasi dan jaringan, memberikan sarana dan prasarana usaha, serta produk unggulan desa.

Dampak dari pengelolaan dana desa dalam kurun waktu tiga tahun selama tahun 2017 – 2019, jika dilihat melalui pandangan sejahtera secara objektif belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi secara maksimal. Namun apabila dilihat dari pandangan subjektif, masyarakat sudah lebih sejahtera dengan adanya akses jalan yang bagus, fasilitas pendidikan yang semakin memadai, dan juga adanya bantuan renovasi rumah bagi masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan pengalokasian dana desa masih banyak ditujukan untuk pembangunan fisik, karena wilayah Desa Wukirsari memang masih membutuhkan. Perkembangan infrastruktur setelah adanya dana desa jauh lebih baik jika dibandingkan dari sebelumnya. Jika dilihat dari dampak ekonomi, sasaran kebijakan dana desa ini masih sangat terbatas sehingga program-program

yang diberikan belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara ekonomi.

B. Saran

Saran yang diajukan untuk mengoptimalkan perencanaan dan penguatan strategi kebijakan oleh pemerintah desa untuk membangun kesejahteraan masyarakat melalui dana desa yaitu perlunya membuat *master plan* pembangunan desa sehingga tata ruang dan tata wilayah akan lebih teratur. Dalam proses perencanaan, pemerintah desa tidak hanya mengajak masyarakat untuk mengusulkan program saja, tetapi juga ikut mengawal sehingga akan lebih partisipatif. Selain itu perlu ada pemerataan keterlibatan masyarakat pada saat melakukan musyawarah di tingkat dusun sampai desa, sehingga tidak hanya kelompok yang berkepentingan saja yang terlibat untuk formalitas unsur yang harus ada sesuai regulasi.

Agenda perencanaan kedepan agar difokuskan untuk memberdayakan masyarakat dari segi perekonomiannya, karena pembangunan infrastruktur sudah hampir merata pada setiap wilayah sehingga dampak bagi kesejahteraan masyarakat akan dirasakan. Yang terakhir, kemampuan dan produktivitas sumber daya manusia dalam hal ini perangkat desa harus lebih di tingkatkan lagi. Kedepannya regulasi tentang masa jabatan perangkat desa perlu dipertimbangkan lagi, sehingga bukan umur untuk penentuan masa pensiun tetapi produktivitas kinerja dalam berkarya di desa. Dengan demikian, harapan pembangunan desa sebagai estafet awal pembangunan nasional dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

- Adi, Isbandi Rukminto. 2003. *Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Arikunto, Suharsimi. 1991. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badrudin. 2014. *Dasar-dasar Manajemen : Pengertian Evaluasi, Fungsi dan Tujuan Evaluasi, dan Model Evaluasi*. Bandung : Alfabeta
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bryson, John M. 2000. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial : Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H.D, Sudjana. 1992. *Manajemen Pendidikan Luar Sekolah : Fungsi dan Karakteristik Perencanaan*. Bandung : Nusantara Press
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Nawawi, Hadari. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gama Univ. Press
- Pemerintah Desa Wukirsari. 2018.*Buku Sejarah Desa Wukirsari*
- Sholeh, Chabib dan Heru Rochansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media
- Soetomo. 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkan dalam Prespektif Masyarakat Lokal* Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif,cetakan 4*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Widjaya, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Jurnal dan Skripsi :

Endang Juliana. 2017. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan [Skripsi]. Medan (ID): Universitas Sumatera Utara

Inten Meutia dan Liliana. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa*. Volume 8: 2

Miftahuddin. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia

Muhammad Nafiudin. 2018. Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan : Studi Implementasi Dana Desa di Desa Jambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang[Skripsi]. Yogyakarta (ID): UIN sunan kalijaga Yogyakarta

Yanhar Jamaluddin, dkk.2018. *Analisis Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah*. Volume 6:1

Dokumen :

APBDesa Tahun Anggaran 2017

APBDesa Tahun Anggaran 2018

APBDesa Tahun Anggaran 2019

Monografi Desa Wukirsari Tahun 2018

Maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia Yogyakarta, Nomor 5 Tahun 1948 tentang Hal Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan dan Nama-Namanya

RPJM Desa Tahun 2018 – 2024

Realisasi APBDesa Tahun 2017

Realisasi APBDesa Tahun 2018

Realisasi APBDesa Tahun 2019

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018

Website :

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/membangun> (diakses pada tanggal 3 November 2019)

Angga Rusiana, Dita. 2017. BUMDes Motor Penggerak Desadi <http://ekbis.sindonews.com/read1174581/34/bumdes-motor-penggerak-ekonomi-des-1485440604> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019)

<http://www.presidentri.go.id/desa/memajukan-ekonomi-des-melalui-bumdes.html>(diakses pada tanggal 20 Oktober 2018)

<https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-des-rugikan-negara-rp-406-miliar?page=all>(diakses pada tanggal 20 Oktober 2018)

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Sutrisno, M.Pd selaku Ketua BPD, pada Tanggal 5 November 2019

Wawancara dengan Bapak Susilo Hapsoro, S.E selaku Kepala Desa, pada Tanggal 8 November 2019

Wawancara dengan Bapak Asnan Hidayat selaku Kasi Kesejahteraan, pada Tanggal 8 November 2019

Wawancara dengan Bapak Muiz Yoga Maulana, S.Si selaku Kasi Pelayanan, pada tanggal 8 November 2019

Wawancara dengan Ibu Maryanti selaku Sekretaris Desa, pada Tanggal 8 November 2019

Wawancara dengan Rahmat Hidayat, selaku direktur BUMDesa, pada tanggal 10 November 2019

Wawancara dengan Bapak Marsudi selaku ketua paguyuban dukuh, pada tanggal 11 November 2019

Wawancara dengan Bapak Suparman selaku ketua RT, pada tanggal 16 November 2019

Wawancara dengan Ibu Istijanah, pada tanggal 16 November 2019

Wawancara dengan Ibu Winanti selaku masyarakat pengrajin sepatu rajut, pada tanggal 16 November 2019

Wawancara dengan Bapak Supiono, pada Tanggal 17 November 2019

Wawancara dengan Wahyu Nur Setiawan selaku perwakilan masyarakat, pada Tanggal 17 November 2019

Wawancara dengan Ibu Etik Dwi Lestari selaku Pendamping Desa, pada Tanggal 20 November 2019

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Musyawarah Dusun



Musyawarah Desa



Papan Informasi APBDesa

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA PEMERINTAH DESA WUKIRSARI KECAMATAN INGOIRI TAHUN ANGGARAN 2019					
KODE	U R A I A N	ANGGARAN		Jumlah	2
		VOLUME	HARGA SATUAN		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN			4.478.738.000,00	
1.1	Pendapatan Asli Desa			80.000.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			80.000.000,00	
1.1.1.01	Penghasilan Tanah Kas Desa	PAD	1 LA	70.000.000,00	70.000.000,00
1.1.1.02	Hasil Kava NIRA Desa	PAD	1 LA	10.000.000,00	10.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer			4.398.738.000,00	
1.2.1	Dana Desa			1.728.278.000,00	
1.2.1.01	Dana Desa	DD	1 Tahun	1.728.278.000,00	1.728.278.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00	
1.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	PH	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
1.2.2.02	Kompensasi Tanah Kas Desa	PH	LA	0,00	0,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa			1.820.467.000,00	
1.2.3.01	Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.820.467.000,00	1.820.467.000,00
1.2.4	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			848.000.000,00	
1.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	PK	1 Tahun	848.000.000,00	848.000.000,00
	Jumlah Pendapatan			4.478.738.000,00	

APBDesa Tahun 2019

DESA WUKIRSARI RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2018					
U R A I A N	ANGGARAN		Jumlah	2	3
	VOLUME	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DESA			3.846.802.860,00	
1.1	Pendapatan Asli Desa			87.000.000,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			87.000.000,00	
1.1.1.01	Tanah Kas Desa			87.000.000,00	
1.1.1.02	Hasil Usaha Desa	PAD	1 Tahun	87.000.000,00	87.000.000,00
1.1.2	Hasil Kava NIRA Desa	PAD	1 Tahun	87.000.000,00	87.000.000,00
1.2	Pendapatan Transfer			3.759.802.860,00	
1.2.1	Dana Desa			1.200.000.000,00	
1.2.1.01	Dana Desa	DD	1 LA	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			120.444.500,00	
1.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PH	1 LA	20.797.300,00	20.797.300,00
1.2.2.02	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PH	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa			1.820.467.000,00	
1.2.3.01	Alokasi Dana Desa	ADD	1 LA	1.820.467.000,00	1.820.467.000,00
1.2.4	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			558.897.000,00	
1.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	PK	1 LA	558.897.000,00	558.897.000,00
	Jumlah (Rp)			3.846.802.860,00	

APBDesa Tahun 2018

DESA WUKIRSARI RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2017					
U R A I A N	ANGGARAN		Jumlah	2	3
	VOLUME	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DESA			3.266.428.370,00	
1.1	Pendapatan Asli Desa			120.178.750,00	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			120.178.750,00	
1.1.1.01	Tanah Kas Desa			120.178.750,00	
1.1.1.02	Hasil Usaha Desa	PAD	1 Tahun	60.000.000,00	60.000.000,00
1.1.2	Hasil Kava NIRA Desa	PAD	1 Tahun	37.178.750,00	37.178.750,00
1.2	Pendapatan Transfer			3.146.249.620,00	
1.2.1	Dana Desa			1.188.838.000,00	
1.2.1.01	Dana Desa	DD	1 Tahun	1.188.838.000,00	1.188.838.000,00
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah			120.444.500,00	
1.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PH	1 Tahun	100.000.000,00	100.000.000,00
1.2.2.02	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	PH	1 Tahun	20.797.300,00	20.797.300,00
1.2.3	Alokasi Dana Desa			1.827.887.000,00	
1.2.3.01	Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	1.827.887.000,00	1.827.887.000,00
	Jumlah (Rp)			3.266.428.370,00	

APBDesa Tahun 2017



Penerima Rumah Tidak Layak Huni



Pavingblok Jalan Dusun



Pemasangan Papan Kegiatan



Tempat Pengelolaan Sampah



Pelatihan Tata Boga



Kegiatan Posyandu



Wawancara dengan Kepala Desa



Monev BPD Pada Pemerintah Desa



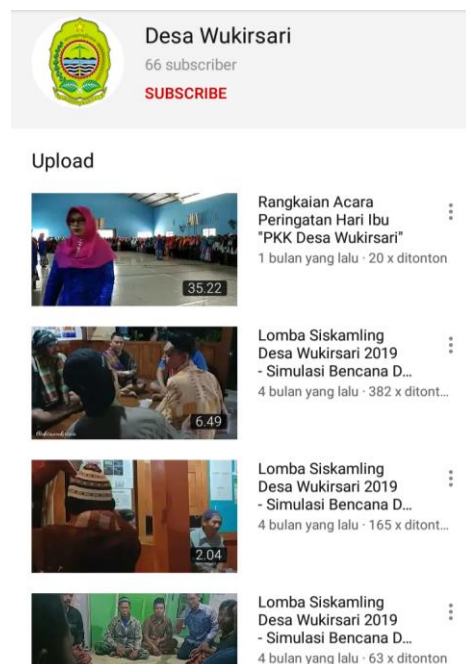
Instagram Desa Wukirsari



Facebook Desa Wukirsari



Twitter Desa Wukirsari



Youtube Desa Wukirsari

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Syarif Hidayat
 Tempat, tanggal lahir : Bantul, 16 Juni 1995
 Alamat : RT 04 Nogosari I Wukirsari
 Imogiri Bantul DIY
 Agama : Islam
 E-mail : masyarif.official@gmail.com



B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK PKK Nogosari (2001)
2. SDN Ngasinan (2002 - 2007)
3. MTsN Giriloyo (2007 - 2010)
4. SMKN 1 Pleret (2010 - 2013)
5. STIEBBANK (2014 - 2015)
6. UIN Sunan Kalijaga (2015 - 2020)

C. Prestasi / Penghargaan

1. Awardee Djarum Beasiswa Plus Tahun 2017/2018
2. Finalis Program Kompetisi Community Empowerment Djarum Tahun 2018

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Karang Taruna
2. Ketua Keluarga Mahasiswa Bantul
3. Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa DIY
4. HMPS PMI UIN Sunan Kalijaga
5. Forum Komunikasi Mahasiswa PMI Se-Indonesia Wilayah III
6. Laboratorium Pengembangan Masyarakat

Yogyakarta, 2 Februari 2020

Syarif Hidayat

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pemerintah Desa dan BPD :

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah bapak bisa menjelaskan untuk apa saja dana desa bapak pergunakan ?
2. Apa saja yang menjadi prioritas penggunaan dana desa ?
3. Apa alasan pertimbangan dipilihnya program tersebut ?
4. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program tersebut ?
5. Bagaimana proses perencanaan kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Wukirsari ?
6. Dalam setiap musyawarah, siapa saja yang terlibat ?
7. Dalam setiap musyawarah, aspirasi-aspirasi dari siapa yang sering Bapak/Ibu dengar ?
8. Dalam pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat ?
9. Apakah kebijakan pemilihan program tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
10. Bagaimana pandangan pemerintah desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa Wukirsari ?
11. Bagaimana prosedur mekanisme (Standard Operating Procedure) dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa ?
12. Bagaimana penyerapan dana desa di Desa Wukirsari tahun 2017 – 2019 ?

13. Adakah fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa Wukirsari dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ?
14. Dalam perumusan kebijakan menyangkut masalah dana desa, apakah Pemerintah Desa melakukan sosialisasi ?
15. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan pengelolaan dana desa ini dilaksanakan ?
16. Bagaiman koordinasi dengan pihak pelaksana maupun penerima manfaat?
17. Adakah landasan hukum yang mengatur dan melindungi kebijakan program tersebut ?
18. Apakah ada tindakan partisipatif oleh masyarakat dalam pengelolaan dana desa ?
19. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa ?
20. Bagaimana strategi kebijakan dari Pemerintah Desa dalam penyusunan dana desa ini ?

Masyarakat :

1. Kebijakan yang bagaimana yang masyarakat harapkan dari pemerintah desa untuk mendukung adanya dana desa tersebut ?
2. Apakah pemerintah desa telah memberikan informasi bahwa ada dana desa ?
3. Dalam pelaksanaan kebijakan dana desa ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh pemerintah desa ?
4. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai kebijakan program yang telah dibuat oleh pemerintah desa dengan dana desa ?
5. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa ?
6. Adakah tindakan pemilihan orang yang terlibat dalam perencanaan sampai pelaksanaan dana desa setelah kebijakan ini dibuat ?
7. Apakah keuntungan atau kontribusi yang didapat dengan adanya dana desa tersebut ?
8. Bagaimana dampak dari dana desa tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dan bagaimana tanggapan masyarakat sebagai penerima manfaat tersebut ?